

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Keuangan

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen berasal dari gabungan kata Latin "*manus*," yang bermakna bertindak, dan "*agere*," yang berarti melaksanakan. Kata-kata ini digabungkan dengan kata kerja "*managree*," yang maknanya menangani. "*Managree*" diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi kata kerja "*to manage*," dan dari situlah muncul kata "manajemen." Dalam bahasa Indonesia, "manajemen" dapat juga diterjemahkan sebagai "administrasi." Secara terminologis, manajemen didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan wirausaha yang melibatkan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.¹

Menurut Anthony dan Govindarajan manajemen keuangan adalah manajemen keuangan yang mencakup perencanaan dan pengendalian sumber daya keuangan serta memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan untuk menjaga akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.²

Menurut Depdiknas, manajemen keuangan merupakan kegiatan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan. Dengan

¹ Kompri, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 1.

² Vijay Govindarajan Anthony Robert N, *Manajemen Control System*, (Jakarta, MC Graw Hill, 2007), 56.

demikian manajemen keuangan dapat dimaknai serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.³

Makna manajemen bisa diuraikan dari tiga perspektif, yakni manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kelompok manusia, dan manajemen sebagai ilmu dan seni. Dalam pengertian pertama, manajemen dijelaskan sebagai suatu proses di mana pelaksanaan tujuan khusus diatur dan diawasi. Pengertian kedua menyebutkan bahwa manajemen merujuk pada sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan. Dengan kata lain, manajemen mencakup semua individu yang melakukan aktivitas kepemimpinan dalam suatu kelompok atau komite.⁴ Manajemen sama dengan al-tadbir (pengaturan) yang terdapat di dalam Al-Quran seperti firman Allah swt. :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْلَهُ ١٠٠٠ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya:

Dia mengendalikan semua aspek dari langit ke bumi, dan kemudian pengaturan tersebut kembali kepada-Nya dalam waktu satu hari yang setara dengan seribu tahun menurut perhitunganmu. (Q. S As-sajadah: 05)⁵

Ayat tersebut menyiratkan bahwa Allah swt berperan sebagai pengaturnya alam. Namun, sebagai khalifahNya bumi, manusia memiliki

³ Nur Komariah, "Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan,"(Jakarta: Jurnal Al-Afka, 2018), 70.

⁴ Anang dan Mahardika, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 265.

tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur bumi dengan sebaik-baiknya, selaras dengan metode yang sudah ditentukan oleh Allah swt dalam mengatur alam semesta ini.

Manajemen bisa dijelaskan sebagai proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya dengan tujuan menggapai suatu target. Sebaliknya, pengelolaan keuangan merujuk pada kegiatan organisasi yang melibatkan perencanaan, pengendalian, dan analisis aktivitas keuangan terkait dengan pengumpulan dana, penggunaan dana, dan pengelolaan aset, yang bergantung pada niat dan tujuan organisasi.

2. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuannya manajemen keuangan bukan hanya sekedar tanggung jawab sosial perusahaan, namun juga merupakan fungsi perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan kebahagiaan pengelola dan nilai-nilai perusahaan, menjamin kelangsungan hidup perusahaan (keberlangsungan bisnis), dan mewujudkan kepentingan masyarakat. Tujuan manajemen keuangan adalah:⁶

- a. Merencanakan rencana keuangan, rencana pemasukan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu, dan kegiatan lainnya.
- b. Penyusunan rencana keuangan, pemantauan rencana keuangan termasuk alokasi pengeluarannya dan pendapatannya.

⁶ Harmon, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 9.

- c. Manajemennya keuangan, penggunaannya asetnya perusahaan guna memaksimalkan asetnya yang tersedia dengan berbagai metode.
- d. Mencari pembiayaan, mencari serta memakai sumbernya pembiayaan yang ada guna usaha intinya perusahaan.

3. Fungsi Manajemen Keuangan

Henry Fayol menjelaskan fungsi manajemen juga memiliki tugas kepemimpinan dalam menjalankan kegiatannya meliputi beberapa hal, yaitu: dalam perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian. Supaya mempermudah pembahasan tentang fungsi-fungsi manajemen keuangan dalam islam, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan ialah suatu proses pertama yang dilakukan ketika hendak melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan hendak dicapai dalam memberikan hasil yang optimal. Bahkan Allah SWT memberikan petunjuk kepada setiap orang yang beriman untuk bisa menggambarkan sebuah rencana apa yang akan dikerjakan dikemudian hari.⁷

Allah SWT ciptakan alam semesta dengan kebijaksanaan dan perencanaan yang sempurna, serta tujuannya yang jelas, sebagaimana tercantum dalam ayat 27 surat Shaad:

⁷ Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 50.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ

لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Artinya:

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” (QS. Shaad ayat 27).⁸

Ayat ini gambarkan keagungan dan kekuasaannya Allah yang sempurna. Allah ciptakan alam semesta dengan berbagai faedah dan manfaat yang terkandung di dalamnya, yang dapat diketahui atau tidak diketahui oleh manusia. Tujuan utama penciptaan ini adalah supaya manusia dapat sembah Allah dan mengakui kebesaran-Nya. Di hari kiamat, setiap individu akan dihadapkan pada pertanggungjawaban dan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia.

b. Pencatatan

Pencatatan ialah mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi, mencatatnya secara sistematis dan kronologis. Pencatatan sendiri digunakan sebagai tanda bahwa suatu peristiwa telah terjadi sebuah perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan akuntansi keuangan dimulai pada tahap pengumpulan dokumen yang secara langsung memeperngaruhi peristiwa transaksi. Misalnya kuitansi, faktur, nota, dan lain-lain. Langkah berikutnya

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terejemahnya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 155.

adalah menulis transaksi tersebut ke dalam jurnal lalu memasukkannya ke dalam buku besar.⁹ Jadi pencatatn dalam fungsi manajemen keuanagn tidak hanya sekedar mencatat transaksi, tetapi juga merupakan alat penting untuk memantau, mengendalikan, merencanakan, dan membuat keputusan terkait keuangan perusahaan.

c. Pelaporan

Pelaporan adalah suatu informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan dalam kondisi baik dan buruk. Salah satu tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan suatu informasi mengenai perubahan status keuangan perusahaan, yang berguna bagi sebagian besar pengguna dalam mengambil keputusan keuangan, dan selain itu laporan keuangan juga menyangkut perkembangan keuangan dan status keuangan yang ada dalam sebuah perusahaan.¹⁰ Dengan demikian, pelaporan keuangan tidak hanya sekedar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan alat penting untuk komunikasi , pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan pengendalian keuangan perusahaan.

d. Pengendalian

Untuk melakukan pengendalian perusahaan memerlukan suatu sitem pengendalian agar dapat melaksanakan operasi pengendalian secara efektif dan efisien. Pengendalian mengacu pada seperangkat

⁹ Wahyan Suarjana, "Manajemen Keuangan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 2 No.15 (2018), 43.

¹⁰ Ismail Sholihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Erlangga, 2010), 193.

alat yang terjadi dari penetapan tujuan foemal, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, dan sistem umpan balik yang memberikan manajer berbagai informasi tentang strategi dan struktur perusahaan apa yang saat ini bekerja secara efektif dan efisien, tanpa pengendalian sistem yang baik, besar kemungkinan kinerja perusahaan akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan akibat pengelolaan dan efesiensi. Tanpa sistem pengendalian yang baik maka penyimpangan kinerja perusahaan lebih besar sari tujuan yang telah ditetapkan, karena pihak manajemen tidak menerima informasi yang cukup atau terlambat menerima informasi untuk melakukan tindakan manajemen yang diperlukan.¹¹

4. Prinsip Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan mengikuti sejumlah prinsip, seperti diatur dalam Pasal 48 UU No. 20 Tahun 2003 yang menekankan prinsip pemerataan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dananya pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.¹²

a. Transparansi (*Transparancy*)

Organisasi diharapkan untuk beroperasi secara terbuka serta memberi informasi pada pemangkunya kepentingan mengenai rencananya serta kegiatan mereka. Hal ini melibatkan penyusunan

¹¹ Ibid.,194.

¹² Fatra dan Edi Harapan, 'Implementasi Prinsip Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMA Muhammadiyah 1 Palembang', *JMKSP*, 2.1 (2017), 48-49.

laporan keuangannya yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pemangkunya kepentingan serta penerima manfaatnya. Ketidaktransparanan menandakan adanya hal yang disembunyikan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab moral atau hukum individunya, kelompoknya, atau organisasinya. Organisasi perlu bisa jelaskan penggunaan sumber daya dan pencapaian yang sudah mereka raih untuk dapat bertanggung jawab pada pemangkunya kepentingan dan penerimanya manfaat.

c. Efektivitas

Prinsip efektivitas dalam manajemen keuangan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan harus mampu mengumpulkan dana untuk mencapai tujuan entitas yang bersangkutan dan kualitasnya selaras dengan rencananya yang sudah diimplementasikan.

d. Efisiensi

Efisiensi merujuk pada perbandingan optimal antara inputnya dan outputnya, atau diantara kinerja dan hasilnya. Keberhasilan efisiensi mencakup sejumlah faktor, termasuk pemanfaatan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya dengan cara yang paling baik.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

UMKM ialah usaha potensial bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, perlu digali peluang-peluang yang ada untuk mengoptimalkan pelaksanaannya dan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Tentunya, perkembangan ini dapat lebih optimal apabila pemerintah menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan promosi kegiatan guna menghasilkan produk kualitas tinggi yang bisa bersaing di pasar internasional.

Definisi usaha mikro adalah suatu usaha yang dimiliki secara individu atau perorangan atau sebuah badan usaha yang dikategorikan dalam ruang lingkup perdangan yang kecil. UMKM sekarang ini sedang banyak menghadapi terkait akses permodalan, hal ini terjadi karena keterbatasan informasi tentang keberadaan lembaga keuangan. Indonesia dirasa belum memperhatikan secara lebih sektor UMKM sehingga berakibat kesulitan dalam menghadapi kompetisi dengan produk asing.¹³

Usaha sangat kecil didefinisikan sebagai bisnis yang dimiliki oleh individu atau badan usaha, termasuk dalam kategori pemilik usaha kecil. Meskipun demikian, peran UMKM tetap memberi signifikannya kontribusi pada pembangunannya ekonomi nasional. UMKM dihadapkan pada tantangan besar dalam akses permodalan, salah satunya disebabkan

¹³ Chifni Darun Naja Sulistyowati, Yayuk Sri Rahayu, "Penerapan Artificial Interlligence Sebagai Inovasi di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Wadiah: Perbankan Syariah*, 7.2 (2023), 126 <<https://doi.org/http://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.329>>.

oleh keterbatasan informasi mengenai lembaga keuangan. Terlihat bahwa Indonesia cenderung kurang memprioritaskan atau memberikan perhatian yang lebih terhadap sektor UMKM, jadi menghadapi kesulitannya dalam bersaing dengan produknya luar negeri.¹⁴

Permodalannya guna UMKM dapat diatasi dengan keberadaannya lembaga keuangan mikro syariah dengan kemitraan yang terjalin, pastinya permudah akses dari pada dengan banknya sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, maka pengertian UMKM meliputi:¹⁵

- a. Usaha mikro ialah usaha produktifnya individu atau badan usaha tunggal, yang penuh standarnya usaha mikro yang diatur di UU.
- b. Usaha kecil merujuk pada individu atau badan usaha yang penuh kriterianya usaha kecil, tidak termasuk anaknya perusahaan atau cabangnya perusahaan yang mempunyai atau mengendalikan mereka, dan juga bukan bagiannya langsung ataupun tidak langsungnya dari perusahaan menengah atau besar, sesuai dengan ketentuan dalam UU.
- c. Usaha menengah ialah badan usaha mandiri dan produktifnya yang dikendalikan oleh individunya atau perusahaannya, bukan termasuk anaknya perusahaan atau cabangnya sebuah perusahaan yang mempunyai atau dikendalikan baik langsungnya ataupun tidak

¹⁴ Sulistyowati Chifni darun Naja, Yayuk Sri Rahayu, 'Penerapan Artificial Interlligence Sebagai Inovasi Di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah', *Wadiah: Perbankan Syariah*, 7.2 (2023), 126 <https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.329>.

¹⁵ Nasroen Yasabari, *Penjaminan Kredit Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan* (Bandung: PT. Alumni, 2014), 80.

langsungnya oleh suatu korporasi kecil atau besar, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Kriteria UMKM

Kriteria untuk klasifikasi UMKM ditentukan berdasarkan kekayaan bersih (*net assets*) yang tidak termasuk tanahnya dan bangunannya, serta penjualan tahunannya. Rincian kriteria tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Kriteria untuk Usaha Mikro yakni mempunyai kekayaan bersihnya maksimalnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanahnya serta bangunan tempat usahanya, atau mencapai hasil penjualan tahunannya maksimalnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria untuk Usaha Kecil ialah badan usaha yang punya kekayaan bersihnya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanahnya serta bangunan tempat beroperasinya. Alternatifnya, punya hasil penjualan tahunannya lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria untuk Usaha Menengah ialah usaha dengan kekayaan bersihnya melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga maksimalnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah bangunan tempat usahanya.

¹⁶ Ibad., 81.

Ataupun punya hasil penjualan tahunannya lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

3. Potensi Besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Potensi besarnya yang dipunyai UMKM yakni :

- 1) Usaha kecil dan menengah dapat dikatakan mempunyai masa produksi yang singkat karena tidak memerlukan masa produksi yang lama.
- 2) Kesempatan kerja yang sebesar-besarnya dapat diciptakan dan dimanfaatkan.
- 3) Modal, sumber modalnya diperoleh dari modal pribadinya atau pinjaman pihak lainnya.
- 4) Kemampuannya memperoleh peluang yang lebih besar bagi sumber daya manusia untuk berkembang.
- 5) UMKM memberi kesempatan guna kembangkan kreativitasnya dan keterampilannya.¹⁷

C. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban untuk melaporkan secara berkala kepada perusahaan pelapor mengenai berhasil atau tidaknya sudah ditentukan.¹⁸

¹⁷ Rachmad Budiarto, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), 17.

¹⁸ Dwi Martani, *Akuntansi Menengah Berbasis PSAR* (Jakarta: Sulemba Empat, 2014), 54.

Akuntabilitas ialah kewajiban untuk memberikan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab kepada mereka yang bertanggung jawab. Pembahasan mengenai akuntabilitas di satu sisi mengarah pada inisiatif sistem internalnya organisasi yang didasarkan pada aspek profesionalismenya, dan di sisi lain mengarah pada hubungan eksternal yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan politik.¹⁹

Akuntabilitas menjadi perhatian publik dan manfaatnya kini semakin nyata. Peran akuntabilitas menjadi semakin penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Dunia usaha juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada masyarakat, manajemen, atau pemilik modal, dalam hal metode dan hasil yang dicapai, dan sebagai imbalannya, mereka yang menerima tanggung jawab harus terima tanggung jawabnya atas keputusannya yang mereka ambil.²⁰

Akuntabilitas secara umum dapat dipahami sebagai keharusan seseorang untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut dan diarahkan untuk bekerja secara bertanggung jawab dan konsisten. Dengan hal ini akan memenuhi kebutuhan pelanggan yang mencari kinerja tinggi.

2. Aspek-aspek Akuntabilitas

a. Akuntabilitas yakni suatu hubungan (*accountability is a relationship*)

Ini ialah hubungan dua arah antara individunya, kelompoknya, lembaganya dan negaranya serta masyarakatnya. Orang yang memberi

¹⁹ Arif Widyatama, 'Akuntabilitas Keuangan UMKM: Bagaimana Prespektif Dari Sebuah UMKM Bidang Perdagangan', *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 2.5 (2015), 24.

²⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2005), 3.

wewenang bertanggung jawab untuk memberikan arahnya dan bimbingannya yang tepat serta alokasikan sumber dayanya selaras dengan tugas pekerjaannya. Sebaliknya, individu/kelompok/lembaga bertanggung jawabnya guna penuh seluruh kewajibannya.

- b. Akuntabilitas berorientasinya pada hasilnya (*accountability is result oriented*)

Hasilnya yang diharapkan dari akuntabilitasnya ialah perilakunya pejabat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam keadaan seperti ini, seluruh individu, organisasi, dan lembaga mempunyai kewajiban guna melaksanakan tugasnya dan kewajibannya secara bertanggung jawab serta bertindak dan berupaya setiap saat untuk berkontribusi demi tercapainya hasil yang maksimal.

- c. Akuntabilitas memerlukan suatu laporan (*accountability requires reporting*)

Pelaporan kinerjanya adalah lambang akuntabilitas. Memberikan pelaporan kinerjanya adalah kemampuan untuk menggambarkan tindakannya dan hasilnya yang dicapai oleh individu/kelompok/organisasi serta memberikan bukti nyatanya atas hasilnya dan prosesnya yang dilaksanakan. Dalam dunia birokrasi, pertanggungjawaban bagi perseorangan berbentuk laporan menurut kontrak kerjanya, namun bagi instansi berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan).

- d. Akuntabilitas membutuhkan konsekuensi (*accountability is meaningless without consequences*)

Akuntabilitas ialah sebuah kewajiban. Kewajibannya menampilkan tanggung jawabnya, dan tanggung jawabnya memiliki konsekuensi seperti penghargaanannya dan sanksinya.

- e. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*accountability improves performance*).

Tujuan utamanya akuntabilitas yaitu meningkatkan kinerjanya pejabat publik yang melayani masyarakat. Dalam pendekatan tanggung jawab proaktif, tanggung jawab dapat didefinisikan sebagai keterkaitan dan langkah-langkah yang disusun untuk menggapai sarannya yang sudah ditetapkan awalnya, penentuan alokasi sumber dayanya yang sesuai, dan penilaian terhadap pencapaian kinerja. Dalam konteks ini, setiap orang, kelompok, atau lembaga diharapkan untuk secara proaktif mengambil tanggung jawab dalam ikut serta aktif dalam proses evaluasinya dan fokus pada peningkatan kinerjanya.²¹

3. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Terdapat dua jenis akuntabilitas, yaitu a:²²

a. Akuntabilitas internal

Akuntabilitas internal merujuk pada tingkat akuntabilitasnya yang lebih tinggi dari manajemennya. Pada tingkat ini, pegawainya atau pemimpinnya administrator dinilai secara berkala oleh atasan mereka untuk memastikan bahwa mereka sudah memenuhi

²¹ Agus Dwiyanto, *Akuntabilitas* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2015), 8.

²² Baldrick Siregar, *Akuntansi Manajemen* (Jakarta: Salemba, 2013), 13.

berbagai tugasnya yang diamanahkan dalam deskripsi pekerjaannya mereka. Evaluasi tersebut dapat berdampak pada penghargaan seperti kenaikan gajinya atau promosinya, bergantung pada hasil penilaiannya kinerja.

b. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas eksternal, dalam konteks pemerintahan, ialah bentuknya akuntabilitas yang diarahkan kepada lembaga pengawasnya, penilainya, atau pemeriksanya. Lembaga-lembaga seperti Kementerian PAN & RB, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga negara lainnya memiliki peran dalam menilai dan memantau kinerja keuangannya mereka sendiri atau pejabat seniornya yang mengelola organisasinya.

D. Manajemen Keuangan Syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah bisa dimaknai sebagai rangkaian kegiatannya perencanaan, organisasi, penempatan staf, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi keuangan yang didasarkan pada prinsip syariahnya.²³

Dalam konteks ini, Muryasa dalam bukunya yang ditulis oleh Baharuddin dan Moh. Makin menggambarkan manajemen keuangan sebagai serangkaian langkah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dana dengan transparansi kepada masyarakat.

Alicunto juga mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses di

²³ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), 56.

mana upaya bersama sekelompok orang dalam sebuah organisasi, seperti lembaga pendidikan atau perusahaan, diarahkannya guna menggapai tujuannya secara efektif dan efisien.²⁴ Keuangan merupakan komponen yang penting dalam lembaga pendidikan (Burger, Kaufman, & Atkinson, 2015).²⁵

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan jika manajemen keuangan syariah memiliki peran penting dalam berbagai jenis organisasi, termasuk lembaga pendidikan dan perusahaan. Kegiatan utamanya melibatkan perencanaan, pengendalian fungsi keuangan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dananya secara transparan, dengan menjunjung tinggi berbagai prinsip syariahnya.

2. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Prinsip manajemen keuangan syariah yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu meliputi:

- a) Perdagangan didasarkan pada kesepakatan atau kesepakatan bersama diantara dua belah pihak untuk memastikan tak terdapat pihak yang dirugikan atau mendapat perlakuan tidak adil.
- b) Pelaksanaan keadilan. Artinya jumlah timbangan atau bobot, besar kecilnya mata uang dan pembagian keuntungan

²⁴ Arikunto Suharsimi, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: PT Aditya Media, 2008), 3.

²⁵ Siska Yulia Weny, "Manajemen keuangan Pada Sekolah Dasar Untuk Meminimalkan Pajak yang Terutang" *SITTAH: Journal of Primary Education*, Vol. 2 No. 1, April 2021, 19–34.
<https://doi.org/10.30762/sittah.v2i1.2546>

berdasarkan prinsip yang adil agar tidak merugikan salah satu pihak.

- c) Kasih sayang, gotong royong, persaudaraan universal.
- d) Dalam berdagang, tidak diperkenankan melakukan kegiatan penanaman modal pada bidang usaha yang dilarang seperti: Usaha yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan moral bagi masyarakat, seperti narkoba, narkotika, dan pornografi.
- e) Larangan riba.²⁶

3. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Martono dan Harjito menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi utama dalam manajemen keuangan yakni: keputusannya investasi, keputusannya pendanaan, dan keputusan pengelolaan aset. Tujuan dari setiap keputusannya ini adalah untuk mencapai optimalisasi nilai perusahaan.²⁷

a. Keputusan investasi

Keputusannya investasi mencakup alokasinya dana pada investasinya yang diharapkan hasilkan keuntungan di masa depan. Ini sejalan dengan konsep bahwa hanya Allah yang mengetahui dengan pasti tentang masa depan, seperti yang disebutkan dalam ayat Lukman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

²⁶ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia, 2009), 21.

²⁷ Martono dan Agus Hardianto, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2010), 4.

“ Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.” (QS. Lukman ayat 34)²⁸

Ayat tersebut menekankan ketidakpastian masa depan dan perlunya usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan, walaupun risiko selalu ada. Maka, terdapat hubungan erat antara harapan hasil investasi dengan risiko yang dihadapi.

b. Keputusan pendanaan

Keputusannya pendanaan mencakup bagaimana suatu perusahaan mengumpulkan dananya atau modalnya, seringkali dikenal sebagai kebijakannya struktur modal. Manajer keuangannya bertanggung jawab guna pertimbangan dan analisis berbagai sumber ekonomi perusahaan.

c. Keputusan Pengelolaan Aset

Manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lainnya didalam perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan operasional yang dilakukan untuk bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan operasional dari aset-aset yang ada di perusahaan. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pembatasan aset perusahaan menjadi tanggung jawab seorang manajer keuangan dalam membuat keputusan

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 612.